

Ali Usman, Ketua PATAKA

Strategi Implementasi Kebijakan: Mempertahankan Masyarakat Akuakultur KJA Danau Toba, yang Terintegrasi Pariwisata

DASAR PEMIKIRAN

Pada 2019 pemerintah menetapkan Danau Toba (DT) sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Dengan status DPSP di kawasan DT, pemerintah menargetkan pendapatan sebesar Rp5 triliun per tahun dan penyerapan tenaga kerja dengan jumlah besar, sehingga dapat mendorong perekonomian Sumatera Utara menjadi lebih baik lagi. Dengan ditetapkannya status tersebut, keberadaan KJA dan kegiatan ekonomi yang beroperasi di DT menjadi perdebatan.

KAJIAN EMPIRIS

Danau Toba dijadikan objek destinasi layak pariwisata, pemerintah penertiban budidaya perikanan KJA. Penetapan status trofik perairan DT ditargetkan menuju Oligotrofik, kandungan dan Kadar kejernihan air dan menuju tingkatan danau konservasi. Program integrasi budidaya KJA-pariwisata menumbuhkan sektor usaha baru, namun tidak serta merta menghilangkan mata pencaharian masyarakat pembudidaya dan sekitar yang sudah puluhan tahun berbudidaya. Data FAO menyebutkan, Indonesia sebagai negara produsen dan eksportir ikan nila terbesar kedua di dunia setelah China. DT berkontribusi terbesar secara nasional.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Semua pihak perlu bertanggung jawab mengurangi sumber cemaran Danau Toba. Karena sumber cemaran Danau Toba diperairan yang terlihat adalah KJA. Namun banyak sumber pencemaran lain seperti sumber cemaran sungai Danau Toba sebagai inlet, sungai asahan sebagai outlet, pelabuhan, bukit-ladang dan desa, peternakan, pemukiman-hotel, KJA-Rakyat, KJA swasta 1 dan KJA Swasta.
2. Pemerintah harus menetapkan sistem zonasi yang telah ada keppresnya namun pelaksanaannya belum berjalan dengan

baik. Masalahnya masyarakat mempunyai berbagai kesulitan jika melaksanakan zonasi atas kemampuan pribadinya karena KJA cenderung berada di dekat rumahnya karena faktor keamanan.

3. Pemerintah harus mengembangkan teknologi ramah lingkungan terutama manajemen alat dan pemberian pakan untuk budidaya ikan.
4. Pemerintah perlu mengintegrasikan KJA dan wisata. Integrasi perlu dimasukkan ke dalam industri wisata, pemanfaatan teknologi konservasi juga perlu adanya skema pendanaan. Harus ada monitoring dan evaluasi kondisi kualitas air secara regular.
5. Kerjasama peternak KJA dengan perusahaan perlu dilakukan karena KJA perusahaan bisa membantu KJA rakyat baik dari segi teknologi, manajemen dan lain sebagainya. Seharusnya hal tersebut dilakukan begitupun pengendalian pencemaran Danau Toba dalam memperbaiki manajemennya.
6. Pelaku usaha sendiri bekerjasama dalam mengelola perairan Danau Toba dengan berkolaborasi dengan pemerintah dalam berbagai level sehingga ada mekanisme saling mengawasi.
7. Izin usaha untuk KJA masyarakat perlu diberikan karena ijin bisa menjadi salah satu instrumen untuk mengendalikan pencemaran dari KJA perusahaan dan masyarakat dan sekaligus memberikan jaminan berusaha.
8. Pemerintah harus bijak dalam menerapkan Destinasi Wisata Super Prioritas karena apa yang dihadapi saat ini dengan ditetapkannya *geopark* berimbang pada prioritas kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah yaitu kuota produksi sesuai SK Gubernur No. 188 tahun 2017 dan Perpres No. 60 Juni 2021 maka artinya budidaya KJA tidak *feasible* untuk dikelola secara bisnis karena 1 petak hanya bisa menghasilkan sekitar 600 kg/tahun sehingga tidak memungkinkan.
9. Dasar penetapan kuota 10.000 ton per tahun harus ditinjau ulang karena air danau tidak mungkin lagi ke status oligotrofik, sebaiknya didasarkan pada kondisi riil air danau yaitu mesotrofik. Hendaknya IPB CARE memberikan hasil penelitian terakhir ke Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan Pemprov Sumut sebagai dasar penetapan kuota yang baru.
10. Pemerintah diharapkan mendukung keseimbangan dalam promosi, menjaga kelestarian lingkungan, dan juga merevisi SK Gubernur Sumut terhadap kuota. Sehingga tidak mengorbankan bisnis budidaya ikan KJA Danau Toba untuk pariwisata. Alangkah baiknya kedua sektor bisnis dibangun agar mendatangkan devisa dengan melakukan pemisahan daerah destinasi wisata dengan area KJA.